



**PENGARUH KOMPETENSI, INDEPENDENSI, ETIKA AUDITOR,
DAN KECERMATAN PROFESIONAL PADA KUALITAS AUDIT
APARAT INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN SOSIAL RI**

Dimas Wicaksono
Universitas Islam As Syafiah Bekasi

INFORMASI ARTIKEL

Dikirim : 10 Agustus 2018
Revisi pertama : 13 Agustus 2018
Diterima : 14 Agustus 2018
Tersedia online : 28 September 2018

*Kata Kunci : Kompetensi, Independensi,
Etika Auditor, Kecermatan Profesional,
Kualitas Audit*

Email : dimas.wicaksono22@gmail.com

ABSTRAK

Peran audit internal yang dijalankan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial RI dipertanyakan karena adanya korupsi yang tidak terdeteksi oleh aparat inspektorat sebagai auditor internal namun ditemukan oleh auditor eksternal yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris tentang pengaruh kompetensi, independensi, etika auditor dan kecermatan profesional pada kualitas audit aparat Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial RI. Kuesioner disebarkan kepada auditor sebanyak 43 kuesioner. Jumlah yang kembali adalah 32 kuesioner (74%). Metode analisis data yang digunakan ialah analisa regresi linear berganda (multiple regression) dimana kompetensi, independensi, etika auditor dan kecermatan profesional sebagai variabel independen sedangkan kualitas audit sebagai variabel dependen. Hasil penelitian ini menunjukkan kompetensi, independensi, etika auditor, dan kecermatan profesional secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Secara parsial kompetensi, etika auditor, dan kecermatan profesional berpengaruh pada kualitas audit. Sedangkan independensi tidak berpengaruh pada kualitas audit

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kasus kegagalan audit di dunia telah menimbulkan skeptisisme masyarakat mengenai ketidakmampuan profesi akuntan karena banyak laporan keuangan perusahaan yang mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian, tetapi justru mengalami kebangkrutan setelah opini tersebut dikeluarkan. Kasus tidak bekerjanya auditor internal instansi pemerintah terjadi di Layanan Pengawas Keuangan Korea (FSS) adalah regulator keuangan yang terintegrasi Korea Selatan yang meneliti dan mengawasi lembaga keuangan, pihak otoritas pemerintah ini dikelola oleh pegawai negeri sipil. Tiga puluh pejabat FSS termasuk pejabat senior dituduh menerima suap sebagai imbalan lemahnya pengawasan pada beberapa bank yang dianggap bermasalah. Auditor internal di FSS juga dituduh menerima suap sebagai imbalan agar hasil audit bank bermasalah tersebut tetap bagus (Dong A Ilbo, 2011).

Di Kementerian Sosial RI salah satu *fraud* yang paling menyita perhatian publik adalah kasus pengadaan sapi pada tahun 2004 dan pengadaan sarung pada tahun 2006. Dalam kasus ini, KPK sudah menahan mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah sebagai tersangka. KPK mengindikasikan dalam kasus pengadaan sapi negara dirugikan hingga Rp 3,6 miliar. Sedangkan kasus mesin jahit diduga merugikan negara Rp 24,5 miliar. Atas tindakannya itu, KPK menilai mantan Menteri Sosial RI Bachtiar Chamsyah telah melanggar ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Arry Anggadha, 2010). Oleh karena itu peran audit internal yang dijalankan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial RI dipertanyakan karena adanya temuan audit yang tidak terdeteksi oleh aparat inspektorat sebagai auditor internal namun ditemukan oleh auditor eksternal yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Inilah yang menjadi alasan dilakukan penelitian empiris yang dilakukan peneliti.

Pola pertanggungjawaban pemerintah tidak hanya dituntut untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran akan tetapi juga dituntut mempertanggungjawabkan hasil yang dicapai. Pola pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara dikembangkan sejalan dengan teori *stewardship*. Di dalam sistem pemerintahan negara kita yaitu demokrasi, rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi (menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 1). Kekuasaan rakyat diwakilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Rakyat bukan hanya sebagai *principal* namun juga sebagai *stakeholders* yang memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung dalam sebuah organisasi karena dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh tindakan organisasi, tujuan dan kebijakan negara. Di dalam hubungan tersebut *principal* mempercayakan (*trust*) kepada *steward* yakni pemerintah yang lebih *capable* dan siap. Kontrak hubungan antara *stewards* dan *stakeholders* atas dasar kepercayaan bertindak kolektif sesuai dengan tujuan organisasi, sehingga model pada kasus organisasi publik adalah *stewardship theory*.

Pemerintah sebagai *steward* yang telah diamanahkan menjalani roda kegiatan negara menjalani peran melayani dan bertindak kolektif untuk kepentingan organisasi yang sesuai dengan keinginan *stakeholders* serta tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu. *Stewards* membuat pertanggungjawaban keuangan yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan

masyarakat dapat dicapai secara maksimal. Untuk meyakini kebenaran pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dari pihak *stewards*, dibutuhkan pihak yang berkompoten dan independen untuk mengaudit laporan pertanggungjawaban yang disajikan.

Konsep pemerintahan juga bisa diselaraskan dengan teori *stakeholders*, dimana nilai-nilai sosial menjadi landasan dalam penetapan berbagai kebijakan, proses hingga hasil yang diperoleh oleh pemerintahan. Dimana dalam menjalankan roda kegiatan pemerintahan harus memperhatikan konsep kewajiban sosial (*Social Obligation*), tanggung jawab sosial (*Social Responsibility*), dan kepedulian sosial (*Social Responsiveness*). Sehingga, untuk memenuhi hal-hal diatas diperlukan konsep pemerintahan yang baik yaitu *good corporate governance*.

Pada dasarnya penyelenggara negara dalam menjalankan tata kelola pemerintah yang baik (*Good Governance*) wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada masyarakat berupa akuntabilitas keuangan (*Financial Accountability*) dan akuntabilitas kinerja (*Performance Accountability*). *Good Governance* yang baik dan bersih merupakan tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Menurut Mardiasmo (2005), terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya pemerintahan yang baik, yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Pengawasan dilakukan oleh masyarakat dan DPR. Pengendalian dilakukan oleh mekanisme yang dilakukan pemerintah untuk menjamin bahwa sistem kebijakan manajemen dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Sedangkan pemeriksaan dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Internal audit di instansi pemerintah yang merupakan *stewards* dituntut memberikan kualitas audit yang baik yang merupakan bentuk pelayanan kepada *stakeholders*. DeAngelo (1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas seorang auditor dalam menemukan dan melaporkan penyelewengan dalam system Akutansi klien. Kualitas auditor dihubungkan dengan kualifikasi keahlian (kompetensi), ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan, kecukupan bukti pemeriksaan yang kompeten pada biaya yang paling rendah, sikap independensinya dengan klien, memenuhi prinsip standar etika auditor serta melaksanakan kecermatan professional ketika melakukan pemeriksaan.

Kompetensi sendiri menurut AAA Financial Accounting Standard Comitee (2000), keahlian professional yang dimiliki oleh auditor dari hasil pendidikan formal dan pelatihan-pelatihan lainnya. Sedangkan independensi menurut pernyataan umum kedua dalam SPKN adalah sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya.

Etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008) adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. Sedangkan kode etik merupakan suatu ketentuan perilaku yang harus dipatuhi oleh setiap mereka yang menjalankan tugas profesi tersebut. Sedangkan kecermatan professional menurut SPAP (2001) adalah sikap menggunakan kompetensinya secara hati-hati (*prudent*), cermat dan seksama (*due professional care*).

Pada penelitian yang dilakukan Baiq Kisnawati (2012) menyimpulkan bahwa kompetensi dan independensi tidak berpengaruh pada kualitas audit sedangkan etika auditor berpengaruh pada kualitas audit. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan Muh Taufiq Efendi (2010) menunjukkan bahwa kompetensi dan motivasi berpengaruh positif dan signifikan pada kualitas audit namun pengaruh independensi tidak mempunyai pengaruh yang signifikan pada kualitas audit. Dengan berbagai penelitian yang telah dilakukan belum menghasilkan kesimpulan yang konsisten mendorong dilakukannya replikasi penelitian ini meski demikian ada perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian sebelumnya memakai teori agensi sebagai grand teorinya sedangkan pada penelitian ini memakai teori *stewardship* sebagai grand teorinya. Hal ini disebabkan untuk riset yang meneliti di sektor publik lebih cocok memakai *steward* (pelayan) ketimbang *agent* karena auditor internal instansi publik adalah PNS yang sifatnya melayani masyarakat dan bekerja untuk terwujudnya tujuan organisasi tersebut dengan mengabaikan kepentingannya sendiri. Berdasar hal-hal tersebut diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan judul “*Pengaruh Kompetensi, Independensi, Etika Auditor, Kecermatan Profesional pada Kualitas Audit Aparat Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial RI.*”

KAJIAN PUSTAKA

Kualitas Audit (Y)

Arrens (2008) mendefinisikan kualitas audit sebagai probalitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan semua temuan audit pada sistem akuntansi *auditee*. Sedangkan Menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/05/M.PAN/03/2008, pengukuran kualitas audit atas laporan keuangan yang dilakukan oleh APIP, wajib menggunakan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Dalam lampiran 3 SPKN disebutkan bahwa:

“Besarnya manfaat yang diperoleh dari pekerjaan pemeriksaan tidak terletak pada temuan pemeriksaan yang dilaporkan atau rekomendasi yang dibuat. Tetapi terletak pada efektivitas penyelesaian yang ditempuh oleh entitas yang diperiksa.....” (paragraf 17).

Dari pembahasan dimensi dari variabel kualitas audit adalah terlaporkannya semua temuan audit, audit yang dihasilkan sesuai dengan standar pemeriksaan keuangan negara, dan dapat ditindaklanjuti oleh *auditee*. Dengan demikian, indikator yang digunakan untuk mengukur variabel kualitas audit antara lain auditor bisa menemukan temuan audit dengan akurat, auditor melaporkan temuan apa adanya, rekomendasi bisa memperbaiki kesalahan dan menghindari kesalahan di masa mendatang, laporan audit bisa dipahami *auditee*, laporan audit ditindaklanjuti oleh *auditee*, auditor memantau terus tindak lanjut hasil audit.

Kompetensi (X1)

Menurut SPAP (2001), dalam Standar audit pertama menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Sedangkan menurut Muh Taufik Efendy (2010), kompetensi auditor adalah pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan auditor untuk dapat melakukan audit secara objektif,

cermat dan seksama. Sedangkan menurut Munawir (2004) kompetensi ditentukan oleh tiga faktor yaitu pendidikan formal tingkat universitas, latihan teknis dan pengalaman di bidang auditing, dan pendidikan professional yang berkelanjutan selama menjalani karir auditor.

Dari definisi diatas dimensi dari variabel kompetensi adalah pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu, terampil, terlatih secara teknis dan berpengalaman. Oleh karena itu pendidikan formal minimal Strata Satu (S1), memiliki pelatihan di bidang auditing, keuangan, dan akutansi sektor publik, memiliki keahlian di bidang auditing, keuangan, akutansi sektor publik, administrasi pemerintahan dan hukum, mempunyai sertifikasi JFA serta memiliki keahlian berkomunikasi yang efektif menjadi indikator dalam penelitian ini.

Independensi

Menurut Messier (2005), independensi merupakan hubungan yang menghindari terganggunya obyektivitas auditor. Obyektivitas dalam independensi diperlukan agar auditor jujur menyampaikan temuan apadanya sehingga hasil pekerjaan APIP kredibel kualitas audit yang dihasilkan bukan hasil kompromi auditor dengan *auditee*.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya maka dimensi dari variabel independensi adalah tidak bias saat melakukan pemeriksaan, tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain dan tidak subjektif atau condong kepada salah satu pihak. Berdasarkan hal tersebut maka obyektivitas, kejujuran dan tidak mengkompromikan kualitas menjadi indikator dalam penelitian ini. Independensi adalah variabel independen (X2) dalam penelitian ini.

Etika Auditor

Etika auditor menurut Bartens (2001) adalah kode etik merupakan bagian tak terpisahkan dari standart audit yang harus dipatuhi oleh auditor. Kode etik ini dibuat bertujuan untuk mengatur hubungan antara :

- a. Auditor dengan rekan kerjanya
- b. Auditor dengan atasannya
- c. Auditor dengan objek pemeriksanya
- d. Auditor dengan masyarakat

Berdasarkan pembahasan sebelumnya maka dimensi dari variabel etika auditor ialah berintegritas, berprilaku profesional dan menghormati rahasia informasi. Sedangkan hubungan antara auditor dengan rekan kerjanya, dengan atasannya, dengan objek pemeriksaannya dan dengan masyarakatnya tersebut menjadi indikator dalam penelitian ini yang juga diukur dengan skala interval. Etika Auditor merupakan variabel independen (X3) dalam penelitian ini.

Kecermatan Profesional

Menurut SPAP (2001), dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama (*due profesional care*) serta secara hati-hati (*prudent*) dalam setiap penugasan. *Due profesional care* dapat diterapkan dalam pertimbangan profesional (*professional judgement*) saat dilakukan pada aspek audit yang menjadi indikator variabel

kecermatan profesional, yaitu :

- a) Formulasi tujuan audit
- b) Penentuan ruang lingkup audit, termasuk evaluasi risiko audit
- c) Pemilihan pengujian dan hasilnya.
- d) Pemilihan jenis dan tingkat sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan audit
- e) Penentuan signifikan tidaknya resiko yang diidentifikasi dalam audit dan efeknya
- f) Pengumpulan bukti audit
- g) Penentuan kompetensi, integritas, dan kesimpulan yang diambil pihak lain yang berkaitan dengan penugasan audit.

Dari pembahasan sebelumnya dimensi dari variabel kecermatan profesional adalah sikap auditor yang cermat, teliti, seksama dan hati-hati. Kecermatan profesional adalah variabel independen (X4) dalam penelitian ini dan diukur menggunakan skala interval.

Berdasarkan telaah teori, hasil penelitian sebelumnya, penjelasan logis, serta kerangka pemikiran teoritis tentang faktor-faktor yang berpengaruh pada kualitas audit yang dilaksanakan oleh auditor internal, maka dikembangkan hipotesis dengan penjelasan sebagai berikut :

- a) Pengaruh Kompetensi pada kualitas Audit

DeAngelo (1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai berikut : “*the probability that an auditor will both discover and report an error in a client’s accounting system*”. Kompetensi sendiri didefinisikan oleh SPAP (2001) adalah pencapaian keahlian tersebut dimulai dengan pendidikan formalnya, yang diperluas melalui pengalaman-pengalaman selanjutnya dalam praktik audit.

Menurut teori *stewardship, principal* tidak mungkin mengawasi seluruh kegiatan organisasi oleh karena itu *principal* memberikan kepercayaan mengelola organisasi kepada *steward* yang berkompeten. Kompetensi diperlukan untuk mendapatkan kualitas audit yang baik, dengan kompetensi yang baik seorang auditor lebih menguasai bagaimana audit harus dilakukan untuk mengidentifikasi temuan kesalahan yang dilakukan *auditee*. Berdasarkan uraian di atas, penelitian hipotesis yang dikemukakan adalah:

H₁ : Kompetensi berpengaruh signifikan pada kualitas audit.

- b) Pengaruh Independensi pada kualitas Audit

Menurut Messier (2005), independensi merupakan hubungan yang menghindari terganggunya obyektivitas auditor. Obyektivitas sendiri adalah bebasnya seseorang dari pengaruh pandangan subyektif dari pihak-pihak lain yang berkepentingan sehingga dapat mengemukakan pendapat dengan jujur apa adanya.

Menurut teori *Stakeholders*, organisasi publik tidak hanya memberikan manfaat kepada *shareholders* tetapi juga keseluruhan *stakeholders* yaitu seluruh masyarakat. Salah satu tugas seorang auditor internal adalah memastikan jalannya roda organisasi publik tidak ada penyimpangan, dengan tujuan tersebut independensi diperlukan dalam menjalankan tugasnya. Auditor harus tidak condong ke salah satu pihak sehingga auditor tersebut bisa objektif dan jujur mengemukakan temuan yang ada serta memberikan rekomendasi yang tepat agar kualitas auditnya baik. Dengan kualitas audit yang baik, maka pengawasan yang baik juga mendukung tujuan organisasi publik tersebut tercapai. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini

dimaksudkan untuk menguji pengaruh antara independensi dengan kualitas audit, maka hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah:

H₂ : Independen berpengaruh signifikan pada kualitas audit.

c) Pengaruh Etika pada kualitas Audit

Etika menurut Bartens (2001) berarti seperangkat nilai atau prinsip moral yang berfungsi sebagai panduan untuk berbuat, bertindak atau berperilaku. Auditor dalam menjalankan tugasnya dipagari oleh Kode Etik Profesi. Kode etik ini dibuat bertujuan untuk mengatur hubungan antara auditor dengan rekan kerjanya, auditor dengan atasannya, auditor dengan objek pemeriksanya, auditor dengan masyarakat.

Organisasi publik dalam menjalankan tugas dan fungsinya dituntut menggunakan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Pada salah sistem *Good Governance*, etika memegang peranan penting dalam memagari apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Hal demikian juga berlaku pada auditor yang menjadi bagian penting pada struktur organisasi *Good Governance* yang mengharuskan adanya auditor internal pada organisasi tersebut. Auditor dalam memeriksa dipagari oleh kode etik profesi agar menjaga nama baik profesinya dan membuat hubungan dengan *auditee* berjalan baik demi menjaga kualitas audit yang dilakukan auditor internal tersebut. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji pengaruh antara etika profesi dengan kualitas audit, maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah:

H₃ : Etika Profesi berpengaruh signifikan pada kualitas audit.

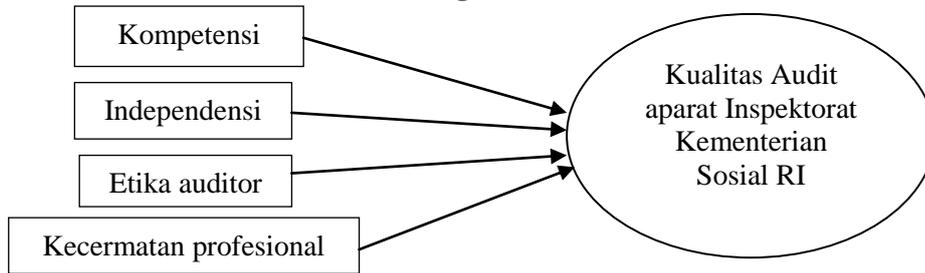
d) Pengaruh Kecermatan Profesional pada kualitas Audit

Menurut SPAP (2001) dalam pelaksanaan audit dan penyusunannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama (*due professional care*) serta secara hati-hati (*prudent*). Salah prinsip dalam teori *good governance* ialah pertanggungjawaban. Setiap pengelola institusi publik hendaknya menghindari pelanggaran pada regulasi yang ada. Seorang auditor internal dalam melakukan pemeriksaan harus menggunakan kecermatan profesionalnya agar bisa mendapatkan pelanggaran Undang-undang, peraturan atau regulasi yang mungkin dilakukan oleh pengelola institusi publik sehingga kualitas audit baik dan bisa menjadi pengingat bahwa pengelola entitas tersebut telah melakukan kesalahan dan rekomendasi yang diberikan bisa ditindaklanjuti oleh pimpinan entitas tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menguji hubungan antara tim audit bersikap hati-hati dan professional dengan kualitas audit, maka hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah:

H₄: Kecermatan Profesional berpengaruh signifikan pada kualitas audit

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



METODE PENELITIAN

Penelitian ini dikelompokkan menjadi penelitian deskriptif dengan maksud menjelaskan isu yang diteliti untuk menguji hipotesis penelitian. Peneliti melakukan penelitian kausal yaitu penelitian yang bertujuan menguji hipotesis tentang pengaruh antara 3 variabel independen yang dihubungkan dengan 1 variabel dependen yang telah dirumuskan sebelumnya.

Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Kementerian Sosial RI yang beralamat di Jalan Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat. Sedangkan jangka waktu penelitian dilakukan dari minggu ke 2 sampai minggu ke 3 bulan Januari 2018.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial RI yang berjumlah 43 orang. Menurut tabel simulasi sampel yang dibuat Sekaran (2006), dengan populasi berjumlah 43 orang dibutuhkan sample sebesar 30 orang.

Prosedur dalam pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner dengan mengajukan pertanyaan atau pernyataan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden. Kuisisioner yang dipakai dalam penelitian ini diadopsi dari kuisisioner yang dilakukan pada penelitian Hasinda Lubis (2009) dan Muh Taufiq Efendy (2010).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini peneliti menyebarkan kuesioner sebanyak 43 eksemplar kepada para auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial RI. Namun, dari 43 eksemplar ada 11 (sebelas) yang tidak kembali karena alasan 6 (enam) orang pensiun, 5 (lima) orang lainnya sedang dalam masa penugasan ke daerah. Seluruh kuesioner yang kembali berjumlah 32, dijadikan sampel dalam penelitian ini.

Auditor mempunyai masa kerja paling banyak 20 – 30 tahun sebanyak 22 orang atau (70%), lalu bekerja antara 10-20 tahun sebanyak 4 orang atau (12%) dan diatas 30 tahun sebanyak 4 orang (12%), dan yang paling sedikit sebanyak adalah yang bekerja kurang dari 10 tahun sebanyak 2 orang (6%). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa rata-rata masa kerja auditor melakukan audit cukup tinggi.

Auditor berdasarkan jenjang pendidikan menunjukkan bahwa auditor memiliki tingkat pendidikan terbanyak dengan jenjang S-1 sebanyak 20 orang atau (63%) dan tingkat pendidikan jenjang S-2 sebanyak 12 orang atau (37%). Melihat data tersebut rata-rata auditor memiliki pendidikan Strata Satu (S1).

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil pengolahan data hasil uji statistik Uji F diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Maka diperoleh kesimpulan bahwa kompetensi, independensi, etika auditor, dan kecermatan profesional berpengaruh signifikan pada kualitas audit dengan pengaruh sebesar 89,7% yang didapat dari nilai *Adjusted R²*. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Muh. Taufiq Efendy dan Baiq Kisnawati. Sedangkan secara parsial kompetensi, etika auditor, dan kecermatan profesional berpengaruh signifikan pada kualitas audit, hanya independensi saja yang tidak berpengaruh pada kualitas audit. Adapun penjelasannya diuraikan dibawah ini.

1. Pengaruh Kompetensi pada Kualitas Audit

Hipotesis pertama menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan pada kualitas audit. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa nilai signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dengan *value* 0.01. Hasil ini didukung juga oleh hasil perhitungan $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,613 > 2,052$). Sehingga hipotesis pertama diterima, hasil ini menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan pada kualitas audit.

Hasil pengujian hipotesis sejalan dengan pendapat Arrens bahwa kemungkinan (*probability*) dimana auditor akan menemukan salah saji tergantung pada kualitas pemahaman auditor (kompetensi). Hasil penelitian ini sejalan pula dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muh Taufiq Efendy (2013) bahwa kompetensi berpengaruh positif pada kualitas audit. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian oleh Baiq Kisnawati (2012) bahwa kompetensi tidak berpengaruh signifikan pada kualitas audit.

Hasil tersebut dapat dipahami bahwa untuk meningkatkan kualitas audit, seorang auditor sangat bergantung pada tingkat kompetensinya. Jika auditor memiliki kompetensi yang baik maka auditor akan dengan mudah melakukan tugas-tugas auditnya sehingga kualitas auditnya menjadi baik dan sebaliknya jika rendah maka dalam melaksanakan tugasnya, auditor akan mendapatkan kesulitan-kesulitan sehingga kualitas audit yang dihasilkan akan rendah pula. Hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan mengindikasikan bahwa kompetensi auditor di Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial RI cukup baik dengan memenuhi indikator-indikator dalam penelitian ini.

2. Pengaruh Independensi pada Kualitas Audit

Hipotesis kedua menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan pada kualitas audit. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa nilai signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dengan *value* 0.77. Hasil ini juga didukung oleh uji t yang didapat nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,295 < 2,052$). Sehingga hipotesis kedua tidak dapat dibuktikan, hasil ini menunjukkan bahwa independensi tidak berpengaruh signifikan pada kualitas audit.

Hasil pengujian hipotesis penelitian peneliti tidak sejalan dengan pendapat Messier (2005) yang mengatakan bahwa independensi merupakan hubungan yang menghindari obyektivitas auditor. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Muh Taufiq Efendy (2013) dan Baiq Kisnawati (2012) bahwa independensi tidak berpengaruh signifikan pada kualitas audit.

Hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan mengindikasikan independensi

auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial RI diduga terganggu. Diduga auditor masih terpengaruh dengan penentu kebijakan pimpinan dan sering adanya mutasi antar satuan kerja. Akibatnya, auditor mempunyai hubungan dekat dengan *auditee* seperti hubungan sosial, kekeluargaan atau hubungan lainnya yang dapat mengurangi independensinya

3. Pengaruh Etika Auditor pada Kualitas Audit

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa etika auditor berpengaruh signifikan pada kualitas audit. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa nilai signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dengan *p value* 0.23. Hal ini didukung oleh uji t yang didapat nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ (2,410 > 2,052). Sehingga hipotesis ketiga dibuktikan, hasil ini menunjukkan bahwa etika auditor berpengaruh signifikan pada kualitas audit.

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti sejalan dengan pendapat Bartens (2001) yang mengatakan bahwa etika bertujuan sebagai panduan manusia untuk bertindak secara bebas namun bisa dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan Baiq Kisnawati (2009) bahwa etika auditor berpengaruh signifikan pada kualitas auditor.

Hasil tersebut bisa diartikan bahwa untuk meningkatkan kualitas audit, seorang auditor bergantung pada sejauh mana auditor memahami dan melaksanakan etika profesi auditor tersebut. Jika auditor memiliki etika yang baik maka auditor akan objektif dan jujur serta tidak mengkompromikan kualitas audit dalam menjalankan tugas-tugas pemeriksaan sehingga kualitas auditnya juga akan baik dan sebaliknya jika etika auditor tersebut rendah maka dalam melaksanakan tugasnya, auditor akan mendapatkan kesulitan-kesulitan sehingga kualitas audit yang dihasilkan akan rendah pula. Hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan juga mengindikasikan bahwa etika auditor di Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial RI cukup baik dengan memenuhi indikator-indikator dalam penelitian ini.

4. Pengaruh Kecermatan Profesional pada Kualitas Audit

Hipotesis keempat menyatakan bahwa kecermatan profesional berpengaruh signifikan pada kualitas audit. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa nilai signifikan pada tingkat signifikansi 0,05 dengan *p value* 0.15. Hal ini didukung oleh uji t yang didapat nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ (2,598 > 2,052). Sehingga hipotesis keempat dibuktikan, bahwa kecermatan profesional berpengaruh signifikan pada kualitas audit.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sejalan dengan SPAP (2001) bahwa dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama serta hati-hati. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasinda Lubis (2009) bahwa kecermatan profesional berpengaruh signifikan pada kualitas audit.

Hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan dapat dipahami sebagai pengaruh signifikan menunjukkan bahwa kecermatan profesional mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kualitas audit. Jika Pengaruh kecermatan profesional baik maka akan searah dengan kualitas audit. Demikian sebaliknya jika kecermatan profesional buruk maka kualitas audit juga buruk. Pengujian hipotesis yang telah dilakukan juga terindikasi bahwa auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial telah melakukan

pemeriksaan dengan menggunakan kemahiran profesionalnya sesuai dalam indikator-indikator dalam penelitian ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil analisis data pada bab IV di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a) Kompetensi berpengaruh signifikan pada kualitas Audit Aparat Inspektorat Jenderal dalam pengawasan keuangan Kementerian Sosial RI.
- b) Independensi tidak berpengaruh signifikan pada kualitas Audit Aparat Inspektorat Jenderal dalam pengawasan keuangan Kementerian Sosial RI.
- c) Etika auditor berpengaruh signifikan pada kualitas Audit Aparat Inspektorat Jenderal dalam pengawasan keuangan Kementerian Sosial RI.
- d) Kecermatan profesional berpengaruh signifikan pada kualitas Audit Aparat Inspektorat Jenderal dalam pengawasan keuangan Kementerian Sosial RI. Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Muh. Taufiq Efendy (2013) dan juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Baiq Kisnawati (2012).

Beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini dan perlu diperhatikan oleh peneliti yang akan datang adalah penelitian yang dilakukan peneliti hanya terbatas pada subjek yaitu para auditor yang terdapat di Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial RI yang berjumlah 32 responden saja. Penelitian juga hanya terbatas pada variabel kompetensi, independensi, etika dan kecermatan profesional. Mengingat masih banyak faktor lain yang juga mempengaruhi kualitas audit.

Data primer yang didapat peneliti hanya menggunakan kuisioner, sehingga mungkin ada kelemahan yang ditemui seperti jawaban yang tidak cermat, tidak serius, asal-asalan serta tidak jujur dan mungkin pertanyaan yang kurang dipahami oleh responden selain itu, Peneliti juga hanya menggunakan data primer, sehingga gambaran mengenai objek yang diteliti kurang mencerminkan keadaan sesungguhnya.

Saran

Setelah melakukan analisis dan pengamatan terhadap semua keterbatasan yang ada, peneliti memberikan saran kepada penelitian selanjutnya bisa menggunakan subjek para auditor di instansi lainnya misal instansi dan kementerian serta badan di Jakarta sehingga hasil penelitian bisa disimpulkan untuk populasi yang lebih luas lagi serta bisa menggunakan data sekunder sebagai data penelitian seperti data tugas pokok dan fungsi, KKP dan konsistensi atas laporan hasil audit. Bagi penelitian selanjutnya juga diharapkan menggunakan teknik wawancara sebagai cara mendapatkan data primer dan bisa menambah variabel yang lebih banyak lagi, misal skeptisme profesional sehingga hasil penelitian akan lebih valid.

Untuk objek penelitian yaitu Kementerian Sosial RI hendaknya para pimpinan menambah jumlah auditor yang belatar belakang akutansi, memberikan beasiswa strata dua (S-2) kepada para auditor dan juga memberikan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi para auditor. Serta para auditor diberikan batasan dalam berhubungan sosial sehari-hari agar independensi auditor bisa terjaga saat melakukan pemeriksaan.

DAFTAR PUSTAKA

- American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). 2008. *Statement on Auditing Standards*. New York: AICPA.
- Anggadha, Arry. 2010. *Mantan Menteri Sosial Ditahan kasus Korupsi*. Diakses pada tanggal 18 November 2017 dari World Wide Web : [http : www.viva.co.id](http://www.viva.co.id)
- Arrens, A.A and Loebbecke, J.K. 2008. *Auditing: An Integrated Approach*, Prentice Hall Inc., New Jersey.
- Bartens, K. 2009. *Persepektif Etika : Esai – Esai Tentang Masalah Aktual*. Yogyakarta : Kanisius.
- Biro Organisasi dan Kepegawaian Kementerian Sosial RI. 2012. *SOTK Kementerian Sosial*. Diakses pada tanggal 17 November 2017. Diambil dari World Wide Web : [http : www.depsos.go.id](http://www.depsos.go.id)
- Boynton, W.C., Johnson, R.N., & Kell, W.G., 2010. *Modern Auditing* (8th Edition) USA Richard D. Irwin Inc.
- Donaldson, L. 2011. *The ethereal hand : organizational economics and management theory*. *Academy of a Management Review*, 15, 369-381.
- Dong A Ilbo. 2011. *Pemberantasan Korupsi di Korea Selatan*. Diakses pada tanggal 1 Desember 2017 dari World Wide Web : [http : www.slideshare.net](http://www.slideshare.net).
- Efendy, Muh. Taufiq. 2010. *Pengaruh Kompetensi, Independensi dan Motivasi pada kualitas Audit Aparat Inspektorat dalam Pengawasan Keuangan Daerah*. Semarang: (Studi Empiris pada Pemerintah Kota Gorontalo). Tesis di Universitas Diponegoro.
- Firdaus. 2015. *Auditing. Pendekatan Pemahaman Seccara Konprehensif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Freeman, Edward. 2014. *Strategic Management : A Stakeholder Approach*. Boston : Pitman.
- Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Edisi 3. Semarang : BP Undip.
- Ghozali, Imam. 2015 *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Menggunakan Program SPSS* . Yogyakarta : Universitas Gajah Mada Press.
- IAI. 2011. *Standar Profesi Akuntan Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi terbaru. (2012)
- Kisnawati, Baiq. 2012. *Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Etika Auditor pada kualitas Audit*. Mataram: (Studi Empiris pada Auditor Pemerintahan Inspektorat Kabupaten dan Kota Se-Pulau Lombok). Tesis di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM Mataram
- Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance. 2016. *Pedoman Good Corporate Governance Indonesia*. Jakarta.
- Lawrence B.Sawyer, Mortimer A. Dittenhover, James H. Scheiner. 2013. *Sawyer's Internal Auditing*, 5th ed. The Institute of Internal Auditors 247 Maitland Avenue, Altamonte Springs Florida.
- Louwers, T. et al. 2008. “*Deficiencies in Auditing Related-Party Transactions: Insights from AAERs*”. *Current Issuein Auditing*, (2)2, A10–A16.
- Lubis, Haslinda. 2009. *Pengaruh Keahlian, Independensi, Kecakapan Profesional*,

- dan Kepatuhan pada Kode Etik Pada kualitas Auditor Pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara, (Tesis tidak dipublikasikan) Universitas Sumatera Utara).* Medan.
- Mardiasmo. 2009. *Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance.* *Jurnal Akuntansi Pemerintah* Vol. 2, No. 1
- Mardiasmo. 2015. *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi Kedua). Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Maruli, A. 2013. 50 Pejabat Dan Pengusaha Dipenjara Karena Korupsi. Diakses pada tanggal 1 Desember 2017 dari World Wide Web : [http : www. antaranews.com](http://www.antaranews.com) (2013).
- Messier, F.W. 2015. *Jasa Audit dan Assurance: Suatu Pendekatan Sistematis.* Diterjemahkan oleh Nuri Hinduan. Edisi 4. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Mulyadi. 2010. *Auditing jilid 1* . Jakarta : Salemba Empat
- Munawir 2014. *Auditing Modern.* Edisi ke 3. Yogyakarta : BPF
- Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2009. *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.* Jakarta
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor PER/05/M.PAN/03/2008. *Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.* Jakarta.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 tentang *Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.* Jakarta.
- Priyatno, Duwi. 2010. *5 Jam Belajar Olah Data Dengan SPSS 17.* Yogyakarta : ANDI.
- Sari, Nungky Nurmalita. 2001. *Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Objektivitas, Integritas, Kompetensi dan Etika Pada kualitas Audit.* Semarang
- Sekaran, Uma. 2016. *Research Methods For Business Metodologi Penelitian untuk Bisnis.* Jakarta : Salemba Empat.
- Sri Lastanti, Hexana. 2015. *Tinjauan Terhadap Kompetensi dan Independensi Akuntan Publik : Refleksi Atas Skandal Keuangan.* *Media Riset Akuntansi Auditing dan Informasi.*
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis,* Bandung: CV. Alfabeta.
- Surjandari, Dwi, Asih. 2014. *Evaluasi Lembaga Keuangan Mikro Yang Beroperasi dengan pendekatan Institusi, Studi kasus pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Wilayah Jawa Timur.* Desertasi di Universitas Brawijaya Malang.
- Suwantyo, Riwi. 2013. *Kasus Bank Lippo dan Degradasi Kepercayaan Publik.* Diakses pada tanggal 18 November 2017. Diambil dari World Wide Web : [http : www.suaramerdeka.com](http://www.suaramerdeka.com)
- Zawitri,Sari. 2009. *Analisis Faktor-Faktor Penentu Kualitas Audit yang Dirasakan dan Kepuasan Auditee di Pemerintah Daerah.* Tesis di Universitas Diponegoro Semarang